

<sup>1</sup>M. Iqbal Febriansyah, <sup>2</sup>Jauzari Helmi, <sup>3</sup>Kevin Immanuel Manurung, <sup>4</sup>M.Tsaqif Rafii

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>1</sup>[febriansyahiqbal76@gmail.com](mailto:febriansyahiqbal76@gmail.com), <sup>2</sup>[jzrhelmy@gmail.com](mailto:jzrhelmy@gmail.com), <sup>3</sup>[kevinmanurung2611@gmail.com](mailto:kevinmanurung2611@gmail.com),

<sup>4</sup>[tsaqifrafii64@gmail.com](mailto:tsaqifrafii64@gmail.com)

### ABSTRACT

*Public finance management is a crucial aspect of government functions aimed at improving public welfare and supporting national development. This study analyzed the central role of state administration in the planning, implementation, supervision, and accountability of public financial management. Through a qualitative descriptive approach, this study identifies challenges faced, such as weak budget planning and corruption practices, as well as the opportunities offered by digital technology development. Research results show that the application of sound governance principles, such as transparency and accountability, is essential to improving the quality of public financial management. In addition, public participation in the budget planning process has been proven to strengthen the legitimacy of the government and ensure that the allocation of funds is in accordance with public needs.*

**Keywords:** *State Administration, Public Finance, Budget.*

### ABSTRAK

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek krusial dalam fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini menganalisis peran sentral administrasi negara dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti lemahnya perencanaan anggaran dan praktik korupsi, serta peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran terbukti dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan publik.

**Kata Kunci :** *Administrasi Negara, Keuangan Publik, Anggaran.*

### Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism checker no 77

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan tidak akan berjalan apabila tidak ada keuangan negara. Dalam negara yang modern, pengelolaan keuangan publik tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pengeluaran dana, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya keuangan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

Administrasi negara memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan publik, karena melibatkan berbagai fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran negara. Melalui mekanisme administrasi yang terstruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya penting untuk memastikan pengelolaan yang sesuai dengan hukum dan regulasi, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan dana publik, seperti korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di sektor administrasi publik, hingga praktik korupsi yang merugikan negara. Selain itu, pengawasan yang tidak efektif seringkali menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran dan proyek-proyek pemerintah yang tidak tepat sasaran. Dalam laporan-laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sering ditemukan temuan terkait penyimpangan penggunaan anggaran yang menunjukkan perlunya perbaikan mendalam dalam tata kelola keuangan publik (BPK, 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah menerapkan berbagai sistem digital seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-audit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal infrastruktur teknologi, literasi digital, serta resistensi dari berbagai pihak yang tidak siap menghadapi perubahan.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan informasi. Masyarakat kini tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga ingin memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran dilakukan secara adil dan akuntabel. Hal ini memberikan tekanan bagi administrasi negara untuk terus berbenah dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu, penting untuk memahami secara utuh bagaimana peran administrasi negara dalam setiap fase penyelenggaraan fungsi pengelolaan keuangan publik, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran sentral administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menemukan tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Konsep Administrasi Negara

Administrasi negara adalah suatu sistem dan proses yang melibatkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai cabang ilmu sosial yang relatif baru, administrasi negara berfokus pada bagaimana pemerintah dan aparatur negara menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Secara umum, administrasi negara dapat disimpulkan sebagai rangkaian kebijakan yang diatur oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Prajudi Atmosudirdjo, administrasi negara sebagai alat bantu penyelenggaraan dari pemerintah yang menunjukkan bahwa tanpa administrasi yang baik, maka fungsi-fungsi pemerintahan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Edward H. Litchfield juga beranggapan

bahwa administrasi negara adalah ilmu yang memperdalam tentang bagaimana instansi-instansi pemerintah diselenggarakan, dibekali, dibiayai, dikerahkan, dan dipimpin. (Yusuf, 2024).

Ada beberapa fungsi-fungsi utama dalam administrasi negara menurut Henry Fayol (1917) adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan
2. Mengorganisasikan
3. Memimpin
4. Melaksanakan pengorganisasian
5. Melaksanakan pengawasan

Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek administrasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara merupakan elemen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui kebijakan publik.

## **b. Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik**

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang baik dan efektif, penting untuk memahami berbagai prinsip yang menjadi landasan dalam praktik tersebut. Penanganan keuangan yang transparan dan akuntabel tidak hanya menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga meyakinkan bahwa dana publik dimanfaatkan semaksimal untuk kepentingan bersama. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keterjangkauan, kepatuhan hukum, ketidakberpihakan, dan keberlanjutan menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan kebijakan keuangan (Zahari, at al., 2024). Berikut penjelasan lebih lanjut dari prinsip-prinsip tersebut :

1. **Transparansi**, Keterbukaan informasi mengenai keuangan publik sangat penting agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana. Informasi harus mudah diakses dan disajikan dengan jelas, mencakup pengungkapan yang komprehensif dan akurat.
2. **Akuntabilitas**, Pemerintah diwajibkan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik, dengan menyajikan laporan keuangan yang transparan, serta menjalankan audit internal dan eksternal. Tujuan keuangan harus ditentukan, dan pemerintah harus siap menerima konsekuensi dari kegagalan.
3. **Efisiensi**, Sumber daya publik harus digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah perlu memprioritaskan program yang memberikan manfaat signifikan dan mengurangi biaya administratif yang tidak perlu.
4. **Efektivitas**, Pemerintah harus menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk program-program publik, dengan alokasi sumber daya yang strategis. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan hasil yang dicapai.
5. **Keterjangkauan**, Kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kapasitas ekonomi masyarakat, dengan memastikan bahwa layanan publik yang penting tetap dapat diakses. Pengelolaan utang harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab.
6. **Kepatuhan Hukum**, Semua tindakan keuangan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan dana.
7. **Ketidakberpihakan**, Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara netral, dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif dan adil. Semua pihak harus diperlakukan setara dan bebas dari konflik kepentingan.

8. Keberlanjutan, Keputusan keuangan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang untuk generasi mendatang, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan perlindungan lingkungan.

**c. Teori *Good Governance***

Kepemerintahan yang baik ialah suatu situasi yang memastikan adanya keseimbangan, keselarasan, dan kesesuaian peran antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan pengembangan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Disamping itu, tujuan dari pemerintahan yang baik itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, mengurangi praktik korupsi dan penyimpangan wewenang, menumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam proses pemerintahan.

Jalannya pemerintahan yang baik, didukung dengan prinsip-prinsip yang menjadi acuan, berikut adalah prinsip-prinsip *Good Governance*, diantaranya :

1. Partisipasi, Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
2. Penegakan Hukum, Hukum berlaku untuk semua tanpa pengecualian, melindungi hak asasi manusia.
3. Transparansi, Informasi pemerintah mudah diakses dan dipahami oleh publik.
4. Kesetaraan, Semua individu memiliki peluang yang sama dalam beraktivitas.
5. Daya Tanggap, Instansi publik responsif terhadap aspirasi masyarakat.
6. Wawasan ke depan, Pengelolaan dilakukan dengan visi dan strategi yang jelas.
7. Akuntabilitas, Pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.
8. Pengawasan Publik, Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kegiatan pemerintah.
9. Efektivitas dan Efisiensi, Penggunaan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab.
10. Profesionalisme, Tingkat kemampuan dan moralitas pegawai pemerintah.

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan cepat tanggap atas kebutuhan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Supriadi, 2015)

## **C. METODE PENELITIAN**

Kajian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif untuk menelaah peran administrasi negara dalam penyelenggaraan fungsi manajemen keuangan negara. Digunakannya pendekatan ini karena berfokus untuk menggali secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan keuangan negara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum terkait administrasi negara dan pengelolaan keuangan publik. Serta, mengkaji dokumentasi resmi, dengan menganalisis dokumen seperti laporan keuangan negara dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dalam pengelolaan keuangan publik dan peran administrasi negara. Proses ini melibatkan pengorganisasian data, identifikasi tema, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran administrasi negara dalam pengelolaan keuangan publik dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan anggaran negara (Sugiyono, 2017).

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Administrasi Negara dalam Perencanaan Anggaran**

Administrasi negara mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewajiban ini tidak hanya meliputi aspek keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan kepentingan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, penempatan dana publik harus mengacu pada prioritas dan harapan masyarakat, sehingga APBN dan APBD menjadi alat yang tidak hanya menopang fungsi keuangan, tetapi juga bermanfaat bagi pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat.

Dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, dimulai dari pengumpulan data hingga analisis kebutuhan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu melakukan survei dan dialog langsung dengan masyarakat guna memahami isu-isu yang krusial, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya. Dengan pendekatan ini, anggaran yang dihasilkan akan menjadi lebih relevan dan tepat sasaran, menciptakan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Untuk itu diperlukan kerjasama masyarakat dalam membantu meningkatkan kejelasan dan transparansi dalam penyusunan anggaran. Salah satu cara yang memungkinkan partisipasi tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana masyarakat dapat memberikan usulan dan masukan secara langsung kepada pemerintah. Bentuk peran serta masyarakat tidak hanya memberikan wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, namun juga memperkuat eksistensi pemerintah di mata masyarakat. Dengan menempatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran, pemerintah dapat melihat lebih dalam mengenai kebutuhan masyarakat. Partisipasi ini juga berguna untuk mengurangi risiko penyimpangan penggunaan anggaran, karena masyarakat dapat berperan sebagai pengawas aktif. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam proses tersebut, mereka akan lebih peduli terhadap pemanfaatan anggaran dan hasil yang diharapkan (Silvia, 2024).

Pelaksanaan keuangan publik memerlukan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah harus menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk menilai pelaksanaan program-program yang didanai oleh anggaran. Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan identifikasi masalah sejak dini, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Sistem evaluasi yang baik juga harus melibatkan umpan balik dari masyarakat untuk menilai dampak dari program-program tersebut terhadap kehidupan mereka. Dengan cara ini, pemerintah dapat terus memperbaiki kebijakan dan program berdasarkan kebutuhan yang nyata di lapangan (Kemenkeu, 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi seperti e-budgeting dan e-audit menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel. E-budgeting memungkinkan proses penganggaran dilakukan secara elektronik, yang memudahkan akses informasi bagi publik mengenai alokasi dana (Yuliani, 2020). Sementara itu, e-audit membantu dalam pengawasan penggunaan dana secara real-time, sehingga proses audit menjadi lebih efisien. Dengan adanya teknologi informasi, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat pun dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran, yang pada gilirannya memperkuat peran mereka sebagai pengawas (Kemenkeu, 2021).

## **Pengawasan dan Akuntabilitas**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat vital dalam pengawasan keuangan negara melalui audit terhadap laporan keuangan pemerintah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain BPK, lembaga lain seperti Inspektorat juga melaksanakan pengawasan internal untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Pengawasan eksternal oleh BPK memberikan jaminan kepada publik bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK juga harus disampaikan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah di hadapan legislatif (Silvia, 2024).

Masyarakat juga berperan sebagai pengawas independen dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat melaporkan adanya penyimpangan atau potensi korupsi yang terjadi dalam penggunaan anggaran. Media, di sisi lain, memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara kepada publik. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dan media dalam pengawasan, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana publik. Transparansi informasi mengenai penggunaan anggaran akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

## Tantangan dan Solusi

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan publik adalah adanya praktik korupsi yang masih marak terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Lemahnya penegakan hukum sering kali menjadi faktor pendorong bagi praktik korupsi ini, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya serius dalam memperkuat sistem hukum serta menegakkan sanksi bagi pelanggar hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga diperlukan agar mereka dapat menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih efektif.

Transformasi digital menjadi salah satu solusi yang dapat menjadi andalan untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan publik. Dengan menerapkan sistem elektronik seperti e-budgeting dan e-audit, proses pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan juga sangat penting. Aparatur yang terdidik dan terlatih akan lebih mampu mengelola anggaran dengan baik serta memahami prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (Kemenkeu, 2021).

## E. KESIMPULAN

Administrasi negara memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas. Keberhasilan dalam pengelolaan ini tidak hanya bergantung pada pengumpulan dan pengeluaran dana, tetapi juga pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Meskipun terdapat tantangan seperti korupsi dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran juga merupakan kunci untuk memastikan bahwa alokasi dana mencerminkan kebutuhan dan harapan publik. Melalui mekanisme seperti Musrenbang, masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan legitimasi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki sistem hukum, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, dan menerapkan teknologi digital. Dengan begitu, administrasi negara dapat menjadikan terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara secara profesional, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum serta kemajuan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022. Jakarta: BPK.
- Fayol, H. (1917). General and Industrial Management. Dunod et E. Pinat.

ISSN : 3025-9495

- KEMENKEU. (2021). *Bahas Sedikit Mengenai Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L*. [djpb.kemenkeu.go.id](https://djpb.kemenkeu.go.id/djpb.kemenkeu.go.id).  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-bahas-sedikit-mengenai-monitoring-dan-evaluasi-pelaksanaan-anggaran-belanja-k-l.html>
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2024). PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN ANGGARAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PUBLIK. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(1), 1-9.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i1.11145>
- Sugiyono. (2017). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(2), 45-52.
- Supriadi, Y. (2015). Implementasi Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Yuliani, S. (2020). Reformasi Keuangan Publik dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Negara. *Journal of Public Administration Studies*, 8(3), 210-225.
- Yusuf, M. A. (2024). Pengertian Administrasi Negara: Fungsi, Tujuan, Dan Ciri-Cirinya!. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/administrasi-negara/>
- Zahari, M and Usmany, Paul and Asari, Andi and Didi, La (2024) Pengelolaan keuangan sektor publik. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, Solok. ISBN 978-623-8606-88-7